

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian Damanik, Febra Erlika (2017) *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pengrajin Industri Batu Bata Di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan indikator BKKBN menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin industri batu bata di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah keluarga Pra Sejahtera 50 KK (46,29%), keluarga Sejahtera I sebanyak 30 KK (27,77%), Keluarga Sejahtera II sebanyak 18 KK (16,6%), Keluarga sejahtera III sebanyak 8 KK (7,4%) dan Keluarga sejahtera III Plus hanya 2 KK (1,9%). Dari indikator BKKBN Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Industri Batu Bata di Desa Kepala Sungai rata-rata tergolong Pra Sejahtera

Rofi Taufik Nugroho (2014) dengan judul *Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pengrajin Industri Bata Merah di Kecamatan Pataruman Jawa Barat*. Hasil penelitian bahwa: (1) Total pendapatan rumah tangga pengrajin industri bata merah 50,51% berpendapatan sedang yaitu Rp 2.840.001 - Rp 4.180.000 (2) Tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin bata merah semuanya adalah sejahtera berdasarkan indikator-indikator dari BPS tahun 2005 (3) Analisis tetangga terdekat yang dilakukan pada lokasi industrirumah tangga pengusaha bata merah di Kecamatan Pataruman yang tersebar di tiga desa dan satu kelurahan yaitu Desa Sinartanjung, Mulyasari, Binangun, dan Kelurahan Pataruman termasuk kategori pola penyebaran mengelompok.

Hasil penelitian Febra Erlika (2017) *Analisis Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Pengrajin Industri Batu Bata Di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang*

*Kabupaten Langkat.* Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengrajin industri batu bata di Desa Kepala Sungai yang terdiri dari 360 keluarga. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Proportional Random Sampling yaitu 30% dari jumlah populasi sebanyak 108 KK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, teknik komunikasi langsung dan teknik dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan indikator BKKBN menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin industri batu bata di Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah keluarga Pra Sejahtera 50 KK (46,29%), keluarga Sejahtera I sebanyak 30 KK (27,77%), Keluarga Sejahtera II sebanyak 18 KK (16,6%), Keluarga sejahtera III sebanyak 8 KK (7,4%) dan Keluarga sejahtera III Plus hanya 2 KK (1,9%). Dari indikator BKKBN Tingkat Kesejahteraan Pengrajin Indutri Batu Bata di Desa Kepala Sungai rata-rata tergolong Pra Sejahtera.

Nanda Herawan (2016) Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Pengrajin Anyaman Bambu (Besek/Piti) Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: (1) tingkat pendapatan; (2) tingkat kesejahteraan; (3) ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan terhadap kesejahteraan. Populasi penelitian ini adalah pengrajin anyaman bambu (besek/piti) di Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 30 pengrajin. Berdasarkan tabel Krejcie dengan taraf kesalahan 1%, maka diperoleh sampel berjumlah 29 pengrajin. Pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dengan Rating Scale yang sudah diuji cobakan dan telah memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Analisis data menggunakan Analisis Korelasi ( $r$ ). Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa Pendapatan dalam kategori baik (68,97%), sedangkan Kesejahteraan dalam kategori baik (75,86%). Berdasarkan hasil analisis kuantitatif, dapat disimpulkan bahwa terdapat

pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan terhadap kesejahteraan ( $r=0,812$  dan  $\text{sig} = 0,000$ )

Heni Rahayu Wulandari (2015) Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Sentra Industri Keramik (Studi Kasus Sentra Industri Keramik Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukkan bahwa, secara simultan, modal, tenaga kerja, pendidikan, lama usaha, dan network berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pengusaha. Dan secara parsial dapat diketahui dari kelima variabel terdapat empat variabel yang berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha dengan tingkat kepercayaan 91,8% yaitu sebesar 0.160 untuk modal, 0,433 untuk tenaga kerja, 0,197 untuk pendidikan, 0,595 untuk network, sedangkan variabel lama usaha tidak berpengaruh signifikan. Dan untuk variabel yang paling dominan yaitu variabel tenaga kerja.

## **B. Tinjauan Tentang Kesejahteraan**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesejahteraan merupakan kata benda yang mempunyai arti hak atau keadaan sejahtera, keamanan dan keselamatan dan ketentraman. Kata sejahtera merupakan kata sifat yang memiliki arti aman sentosa dan makmur, serta selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan

kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Berdasarkan definisi tentang kesejahteraan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup baik material maupun non- material, yang dapat diukur dengan adanya pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata, sehingga dapat membuat seseorang merasa aman, sentosa, makmur, dan selamat

## 2. Konsep Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005:66). Istilah kesejahteraan sosial merujuk pada suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisasi dan diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, maupun masyarakat luas (Suharto, 2005:78). Definisi kesejahteraan sosial juga tidak dapat dilepaskan dari proses serta usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tinjauan sosial (Suharto, 2005:79).

Apabila dilihat dari definisinya, istilah kesejahteraan sosial dapat dibedakan menjadi tiga kelompok sebagai berikut (Suud, 2006:77):

1) Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan

Kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan sosial serta bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu semata.

2) Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan Kesejahteraan sosial

dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan melalui upaya pertolongan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan tersebut meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan.

3) Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu berkaitan dengan kebijakan sosial yang menjadi bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dalam hal ini meliputi upaya dan struktur yang terorganisasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan empat bagian saling berhubungan, yaitu isu-isu sosial, tujuan-tujuan kebijakan, peraturan perundangan, dan program-program kesejahteraan sosial

Pada sisi lain, kesejahteraan sosial dapat pula dipandang dalam berbagai makna berbeda namun memiliki substansi sama pada konsepsi berikut (Suharto, 2005:76):

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial

- b. Institusi, yaitu arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan sebagai penyelenggara usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
- c. Aktivitas, yaitu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera

### 3. Tahapan Kesejahteraan

Menurut Sawidak (2005), kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Meskipun demikian tingkatan kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dengan jelas melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh maka pendekatan yang sering digunakan adalah melalui pendekatan pengeluaran rumah tangga atau daya beli rumah tangga yang bersangkutan. Apabila daya beli menurun maka kemampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup menurun sehingga tingkat kesejahteraannya pun menurun (BPS, 2011). Lebih lanjut Badan Pusat Statistik (2011) menyatakan bahwa suatu rumah tangga dapat dikatakan sejahtera apabila:

- a) Seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup masing-masing rumah tangga itu sendiri.
- b) Mampu menyediakan sarana untuk mengembangkan hidup sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### 4. Konsep Kesejahteraan

Konsep Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial bisa dipandang sebagai ilmu dan disiplin akademis. Dalam hubungan ini, kesejahteraan sosial adalah studi

tentang lembaga-lembaga, program-program, personel, dan kebijakan-kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu, kelompokkelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang teroganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial memiliki arti kepada keadaan yang baik dan banyak orang yang yang menamainya sebagai kegiatan amal. Di amerika serikat kesejahteraan sosial juga diartikan sebagai bantuan public yang dilakukan oleh pemerintah bagi keluarga miskin. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), Kesejahteraan sosial adalah: Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup 30 (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.

Pengertian di atas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dimanfaatkan untuk meningkatkan sebuah kualitas hidup melalui sebuah pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Merujuk kepada undangundang No.11 tahun 2009 yang dikutip oleh Suharto (2009:153) mendefinisikan Kesejahteraan Sosial adalah: “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya”

Pekerjaan sosial adanya kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat sebagai biasanya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah: Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, permasalahan dalam bidang pekerjaan sosial erat kaitannya dengan masalah sosial yang dihadapi baik oleh individu, kelompok dan juga masyarakat. Peran pekerja sosial mampu mengatasi semua bentuk permasalahan dan fenomena sosial tersebut dengan melihat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mampu memperbaiki kualitas hidup dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya kembali di masyarakat.

#### 5. Indikator Kesejahteraan

Sementara itu, aspek- aspek yang berkaitan dengan keluarga sejahtera terdiri dari beberapa variabel yaitu agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat (Melvariani, 2003). Pada sisi lain, indikator kesejahteraan yang ditetapkan oleh BPS tahun 2011 meliputi:

##### 1) Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, agama, serta lingkungan (Undang-Undang No 23 Tahun 2006). Kependudukan sangat erat kaitannya dengan demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti Demos adalah rakyat atau penduduk. Donald J. Bogue



(1996) memberikan definisi sebagai berikut: demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Pengetahuan tentang kependudukan adalah penting untuk lembaga-lembaga swasta maupun pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah, dimana masalah kependudukan saat ini telah memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan pemerintah.

Menurut Malthus (1766-1834) yang terkenal sebagai pelopor ilmu kependudukan yang lebih populer disebut dengan prinsip kependudukan (*the principle of population*) menyatakan bahwa penduduk apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini dan dia juga menyatakan bahwa manusia untuk hidup membutuhkan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan apabila tidak ada pembatasan terhadap pertumbuhan, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan sehingga inilah yang menjadi sumber kemelaratan dan kemiskinan manusia.

Penduduk usia produktif adalah penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun (disebut juga angkatan kerja) yang dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya

## 2) Kesehatan dan gizi

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, absorpsi, transportasi, penyimpanan,

metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi (Supariasa dkk, 2002). Pada umumnya zat gizi dibagi dalam lima kelompok utama, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral.

Sedangkan sejumlah pakar juga berpendapat air juga merupakan bagian dalam zat gizi. Hal ini didasarkan kepada fungsi air dalam metabolisme makanan yang cukup penting walaupun air dapat disediakan di luar bahan pangan. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/ wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktifitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan, bahkan dengan tingkat produktivitas yang tinggi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan semakin baik pemenuhan gizi (terpenuhi empat sehat lima sempurna) dan semakin sehat kondisi seseorang maka dapat dikatakan semakin sejahtera, begitu pula sebaliknya semakin kurang terpenuhi kebutuhan gizi dan kondisi kesehatan seseorang yang tidak bagus maka dikategorikan dalam kesejahteraan yang kurang.

### 3) Pendidikan

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat (Ihsan Fuad, 2005). Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara dan untuk itu setiap warga negara tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, daerah darimana

asal seseorang, agama, dan gender, berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya melaksanakan program pemerataan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat dengan disertai peningkatan mutu pendidikan diharapkan sehingga dapat menjadikan warga negara memiliki kecakapan hidup dan keterampilan yang baik sehingga mendorong terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

#### 4) Ketenagakerjaan

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dalam analisis guna mengukur pencapaian hasil pembangunan. Menurut Rahardja dan Manurung (2004) konsep angkatan kerja dibedakan menjadi tiga yaitu bekerja penuh (*employed*), setengah menganggur (*underemployed*), dan menganggur (*unemployed*). Bekerja penuh yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya lebih dari 35 jam/minggu. Setengah menganggur yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Jam kerjanya kurang dari 35 jam/minggu. Menganggur yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut Penganggur Terbuka (*Open Unemployment*). Sedangkan menurut BPS (2014) bekerja 20 menurut jumlah jam kerja dibedakan menjadi tiga yaitu pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu

penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam keatas per minggu, pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu), dan penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu

5) Taraf dan pola konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

6) Perumahan dan lingkungan

Rumah merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal yang mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen No. 9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian,

sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila memiliki perumahan dan lingkungan yang layak huni.

#### 7) Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

#### 8) Sosial lainnya

Perjalanan wisata merupakan salah satu indikator sosial yang menandakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, gaya hidup masyarakat juga cenderung berubah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan tersier yang salah satunya adalah berwisata. Tujuan melakukan perjalanan wisata biasanya untuk relaksasi, menikmati hari libur, menikmati pemandangan alam dan lain-lain.

Aspek sosial lain seperti akses informasi dan hiburan dan akses terhadap media informasi dan komunikasi juga dapat menjadi bagian dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi

pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Kesejahteraan dalam hal ini dapat dilihat sebagai proses rasional untuk melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan (Sen, 2002). Guna menilai pencapaian kesejahteraan tersebut, dalam hal ini aspek- aspek yang dapat dilihat adalah aspek tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of live*), dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen, 2002)

Berdasarkan berbagai indikator yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan bukanlah suatu kondisi yang dapat tercapai dengan sendirinya. Diperlukan upaya-upaya tertentu guna mencapai kondisi kesejahteraan yang dalam hal ini dikenal sebagai upaya pembangunan kesejahteraan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2005).

### **C. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan dari upaya pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Beberapa aspek yang disasar dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial mencakup sebagai berikut (Suharto, 2005):

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;

3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan

Lebih lanjut mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, dalam hal ini terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu (Suharto, 2005:77):

1. Pendekatan Residual

Pendekatan residual menyatakan bahwa pelayanan sosial perlu diberikan hanya apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Bentuknya dapat berupa bantuan finansial dan sosial dalam jangka pendek pada masa darurat (*charity for unfortunates*). Oleh sebab itu, bantuan tersebut harus dihentikan sesegera mungkin apabila lembaga kemasyarakatan telah berfungsi sebagaimana mestinya. Perspektif residual banyak dikenal sebagai pendekatan yang “menyalahkan korban” (*blaming the victim approach*). Oleh sebab itu, berbagai masalah yang menimbulkan tidak tercapainya kesejahteraan akan dinilai sebagai kesalahan individu yang tidak dapat mencapai kesejahteraan tersebut.

2. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional melihat sistem dan usaha kesejahteraan sosial sebagai fungsi yang tepat dan sah dalam masyarakat modern. Pelayanan sosial dalam pendekatan ini dianggap sebagai hak setiap warga negara sehingga sangat mendukung model negara kesejahteraan secara universal. Pendekatan institusional dikenal pula sebagai pendekatan yang “menyalahkan sistem” (*blaming the system approach*). Oleh sebab itu, tidak tercapainya kesejahteraan pada individu tidak dinilai sebagai kesalahan individu, tetapi karena produk dari sistem sosial yang tidak adil.

3. Pendekatan Pengembangan

Pendekatan pengembangan dalam hal ini merupakan pendekatan yang memadukan aspek-aspek positif dari pendekatan residual dan institusional. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan pembangunan sosial. Pada satu sisi, pendekatan pengembangan tidak menentang program-program kesejahteraan sosial, peran aktif pemerintah, serta pelibatan tenaga-tenaga profesional dalam perencanaan sosial. Pada sisi lain, pendekatan pengembangan juga tidak menentang ideologi pendekatan residual sebab menilai bahwa program-program kesejahteraan sosial akan memiliki dampak positif terhadap kondisi ekonomi

